

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Motivasi Penelitian	9
1.6 Kontribusi Penelitian	10
1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	10
1.8 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	13
2.1.1 Fungsi APBD	14
2.1.2 Struktur APBD	15
2.1.3 Manajemen Belanja Daerah	24
2.2 Belanja Pegawai dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam UU HKPD...	27
2.3 Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Pendekatan Penelitian	32

3.2	Populasi dan Sampel	34
3.3	Data dan Teknik Pengumpulan Data	37
3.4	Teknik Analisis Data.....	39
3.4.1	Pengukuran Kondisi Belanja Pegawai dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	39
3.4.2	Eksplorasi Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan Pemda dalam Memenuhi Batasan Belanja Pegawai dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	41
3.5	Teknik Pengujian Data.....	43
3.6	Kerangka Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		46
4.1	Deskripsi Data.....	46
4.2	Analisis Data.....	53
4.2.1	Analisis Data Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia	53
4.2.2	Analisis Data Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan Pemda dalam Memenuhi Batasan Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.....	61
4.3	Pembahasan.....	90
4.3.1	Kondisi Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia.....	90
4.3.2	Eksplorasi Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan Pemda dalam Memenuhi Batasan Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	92
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		153
5.1	Simpulan	153
5.2	Keterbatasan Penelitian dan Penelitian Selanjutnya	159
5.3	Saran	160
DAFTAR PUSTAKA		164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Penelitian.....	45
Gambar 4.1	Sampel Pemda Pemenuhan Rasio Belanja Pegawai.....	60
Gambar 4.2	Sampel Pemda Pemenuhan Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.....	60
Gambar 4.3	Perbandingan Jumlah Referensi Hasil Pengodean Berdasarkan Keluaran Perangkat Lunak NVivo 12 Plus.....	66
Gambar 4.4	Hasil Pengembangan Tema Inefisiensi Belanja Pegawai Berdasarkan Hubungan Antar-Subtema Keluaran NVivo 12 Plus.....	95
Gambar 4.5	Perbandingan Jumlah Referensi Hasil Pengodean pada Tema Inefisiensi Belanja Pegawai Keluaran NVivo 12 Plus.....	102
Gambar 4.6	Hasil Pengembangan Tema Anggaran Belanja Pegawai Berdasarkan Hubungan Antar-Subtema Keluaran NVivo 12 Plus.....	103
Gambar 4.7	Perbandingan Jumlah Referensi Hasil Pengodean pada Tema Anggaran Belanja Pegawai Keluaran NVivo 12 Plus...	106
Gambar 4.8	Hasil Pengembangan Tema Ketentuan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Berdasarkan Hubungan Antar-Subtema Keluaran NVivo 12 Plus.....	107
Gambar 4.9	Perbandingan Jumlah Referensi Hasil Pengodean pada Tema Ketentuan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Keluaran NVivo 12 Plus.....	117
Gambar 4.10	Hasil Pengembangan Tema Kondisi Infrastruktur Daerah Berdasarkan Hubungan Antar-Subtema Keluaran NVivo 12 Plus.....	118
Gambar 4.11	Perbandingan Jumlah Referensi Hasil Pengodean pada Tema Kondisi Infrastruktur Daerah Keluaran NVivo 12 Plus.....	127
Gambar 4.12	Hasil Pengembangan Tema Perencanaan APBD Berdasarkan Hubungan Antar-Subtema Keluaran NVivo 12 Plus.....	128

Gambar 4.13	Perbandingan Jumlah Referensi Hasil Pengodean pada Tema Perencanaan APBD Keluaran NVivo 12 Plus.....	136
Gambar 4.14	Hasil Pengembangan Tema Kapasitas Fiskal Daerah Berdasarkan Hubungan Antar-Subtema Keluaran NVivo 12 Plus.....	137
Gambar 4.15	Perbandingan Jumlah Referensi Hasil Pengodean pada Tema Kapasitas Fiskal Daerah Keluaran NVivo 12 Plus.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pertanyaan Panduan Wawancara.....	38
Tabel 3.2	Kertas Kerja Penilaian.....	40
Tabel 4.1	Sampel Pemerintah Daerah.....	47
Tabel 4.2	Rincian Wawancara Informan untuk Pertanyaan Penelitian Faktor-Faktor yang Menghambat Terpenuhinya Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.....	49
Tabel 4.3	Rincian Wawancara Informan untuk Pertanyaan Penelitian Upaya Pemenuhan Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.....	50
Tabel 4.4	Daftar Dokumen untuk Pertanyaan Penelitian Upaya Pemenuhan Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.....	51
Tabel 4.5	Jumlah Rata-rata Rasio Belanja Pegawai Tahun 2016–2022 pada masing-masing Wilayah.....	55
Tabel 4.6	Rasio Belanja Pegawai Tahun 2022.....	55
Tabel 4.7	Statistik Deskriptif Rasio Belanja Pegawai Tahun 2022.....	56
Tabel 4.8	Jumlah Rata-rata Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2016–2022 pada masing-masing Wilayah.....	57
Tabel 4.9	Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2022.....	58
Tabel 4.10	Statistik Deskriptif Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2022.....	59
Tabel 4.11	Komposisi Informan Sampel Penelitian.....	61
Tabel 4.12	Pengodean Hasil Wawancara.....	63
Tabel 4.13	Tabulasi Subtema pada Tema Ketentuan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.....	67
Tabel 4.14	Tabulasi Subtema pada Tema Inefisiensi Belanja Pegawai.....	68
Tabel 4.15	Tabulasi Subtema pada Tema Kondisi Infrastruktur Daerah.....	69
Tabel 4.16	Tabulasi Subtema pada Tema Perencanaan APBD.....	70
Tabel 4.17	Tabulasi Subtema pada Tema Kapasitas Fiskal Daerah.....	70
Tabel 4.18	Tabulasi Subtema pada Tema Anggaran Belanja Pegawai.....	71
Tabel 4.19	Kodifikasi Pemenuhan Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.....	76

Tabel 4.20	Kodifikasi Pemenuhan Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023 dan 2024.....	80
Tabel 4.21	Kodifikasi Transkripsi Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Pemerintah Kabupaten Badung.....	84
Tabel 4.22	Kodifikasi Transkripsi Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Pemerintah Kota Denpasar.....	84
Tabel 4.23	Kodifikasi Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Terhadap Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	87
Tabel 4.24	Rancangan Pembahasan.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Singkatan
- Lampiran 2. Contoh Kertas Kerja Perhitungan Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
- Lampiran 3. Kertas Kerja Tabulasi Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik masing-masing Pemda
- Lampiran 4. Contoh Manuskrip hasil Transkripsi Verbatim beserta hasil Pengodeannya pada Perangkat Lunak NVivo 12 Plus
- Lampiran 5. Tampilan Tema dan Subtema keluaran Perangkat Lunak NVivo 12 Plus
- Lampiran 6. Contoh Foto Dokumentasi Wawancara